

## **Perkembangan Politik dan Kebudayaan Kerajaan Kutai Berdasarkan Prasasti Yupa**

**Reza Aditia<sup>1</sup>, Rismella Trio Zambulangi<sup>2</sup>, Intan Oktariani<sup>3</sup>, Hudaidah<sup>4</sup>, Wahyu Rizky Andhifani<sup>5</sup>**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email Korespondensi: [hudaidah@fkip.unsri.ac.id](mailto:hudaidah@fkip.unsri.ac.id)

Diterima: 20-07-2026 | Disetujui: 27-07-2026 | Diterbitkan: 29-07-2026

### **ABSTRACT**

*This study discusses the political and cultural development of the Kutai Kingdom by placing the Yupa Inscription as the main source in its historical reconstruction. Through a literature review method, this article analyzes historical, archaeological, and epigraphic literature to understand the dynamics of the kingdom in the 4th to 5th centuries AD. The study shows that the geographical environment of the Mahakam River provided strategic conditions for the formation of a centralized power structure and connectivity with international trade networks. Epigraphic data reveals the existence of an organized succession system, a mechanism of legitimization through ritual offerings, and the role of local elites in the early stages before the influence of Indian culture grew stronger. The use of Sanskrit, Pallava script, and Hindu-Shiva religious practices shows the ongoing process of Indianization that was adapted to the local context. The results of the study confirm that the development of Kutai was the result of interaction between indigenous traditions and foreign elements, thus providing an important basis for the emergence of political, religious, and literacy patterns that later became characteristic of early of the Nusantara.*

**Keywords:** Kutai; Yupa Inscription; Indianization; Epigraphy

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perkembangan politik dan kebudayaan Kerajaan Kutai dengan menempatkan Prasasti Yupa sebagai sumber utama dalam rekonstruksi historisnya. Melalui metode studi pustaka, artikel ini menganalisis literatur sejarah, arkeologi, dan epigrafi untuk memahami dinamika kerajaan pada abad ke-4 hingga ke-5 M. Kajian menunjukkan bahwa lingkungan geografis Sungai Mahakam menyediakan kondisi strategis bagi terbentuknya struktur kekuasaan terpusat serta keterhubungan dengan jaringan perdagangan internasional. Data epigrafis mengungkap adanya sistem suksesi yang terorganisasi, mekanisme legitimasi melalui ritual persembahan, serta peran elite lokal dalam proses awal sebelum pengaruh budaya India menguat. Penggunaan bahasa Sanskerta, aksara Pallawa, dan praktik keagamaan Hindu-Siwa memperlihatkan berlangsungnya proses indianisasi yang disesuaikan dengan konteks lokal. Hasil penelitian menegaskan bahwa perkembangan Kutai merupakan hasil interaksi antara tradisi pribumi dan unsur asing, sehingga memberikan dasar penting bagi kemunculan pola politik, keagamaan, dan literasi yang kemudian menjadi ciri khas peradaban awal Nusantara.

**Katakunci:** Kutai; Prasasti Yupa; Indianisasi; Epigrafi

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Aditia, R., Zambulangi, R. T., Oktariani, I., Hudaidah, H., & Andhifani, W. R. (2026). Perkembangan Politik dan Kebudayaan Kerajaan Kutai Berdasarkan Prasasti Yupa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3028-3038. <https://doi.org/10.63822/vvnj7n70>

## PENDAHULUAN

Kerajaan Kutai Martapura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang berdiri pada abad ke 5 di Nusantara yang terletak di tepi sungai muarakaman (yang sekarang dikenal dengan mahakam), Kalimantan Timur (Sopian & Norhidayat, 2022). Kerajaan ini memiliki peranan penting dalam membentuk perkembangan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di nusantara (Darme & Andhifani, 2023). Peranan tersebut terlihat dari bukti primer yang ada di nusantara berupa prasasti Yupa, yang tidak hanya membahas kondisi kerajaan yang terstruktur, tetapi juga menunjukkan penulisan aksara Pallawa sebagai penggunaan bahasa sanskerta (George, 1975, p. 31). Keberadaan Yupa menjadi bukti konkret bahwa terjadinya proses indianisasi pertama yang ada di nusantara, yaitu fase ketika unsur budaya, sistem keagamaan, dan model politik dari India mulai diadopsi oleh masyarakat lokal. Melalui prasasti tersebut pula terlihat bagaimana kelompok elit lokal mulai membangun struktur kerajaan yang memperoleh legitimasi melalui ritual dan hubungan patronase antara penguasa dan kaum brahmana (Sarip, 2020). Pola-pola ini kemudian menjadi rujukan bagi kemunculan kerajaan Hindu-Buddha lain pada masa berikutnya, seperti Tarumanagara maupun Mataram Kuno, sehingga menempatkan Kutai sebagai pelopor dalam tradisi politik Nusantara pada periode awal.

Kedudukan Kutai sebagai kerajaan perintis menjadikannya elemen penting untuk memahami bagaimana fondasi awal peradaban Indonesia terbentuk, terutama dalam konteks pertumbuhan institusi politik dan perkembangan kebudayaan klasik. Keberadaannya memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Mahakam mengolah interaksi budaya asing menjadi struktur kekuasaan yang stabil dan diterima secara sosial. Kajian terhadap perkembangan Kutai memungkinkan kita menelusuri proses transformasi sosial dan budaya yang membentuk wajah kerajaan-kerajaan Nusantara pada periode klasik.

Posisi Yupa sebagai sumber primer berada pada tingkat paling fundamental dalam rekonstruksi sejarah Kutai. Yupa adalah prasasti batu berbentuk tugu persembahan yang ditulis langsung pada masa kerajaan itu berdiri, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya tidak bersifat rekonstruksi belakangan, tetapi berasal dari konteks zamannya sendiri. Tulisan berbahasa Sanskerta dan beraksara Pallawa yang tertera pada Yupa mencatat nama raja, garis keturunan, kegiatan keagamaan, serta praktik pemberian sedekah kepada kaum brahmana (Damais, 1995, p. 8). Data yang bersifat kontemporer seperti ini memungkinkan kita membaca struktur politik, sistem legitimasi kekuasaan, dan pola budaya Kutai dengan tingkat keandalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sumber-sumber sekunder.

Relevansi topik ini sangat kuat dalam kajian sejarah Indonesia karena Kutai menempati posisi sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Melalui Yupa, kita dapat melihat tahap awal proses pembentukan negara-kota, penetrasi pengaruh India, dan cara masyarakat lokal mengadaptasi ide-ide politik maupun keagamaan dari luar. Pembahasan tentang Yupa juga penting untuk memahami bagaimana tradisi tulis masuk ke Nusantara dan membantu membentuk pola administrasi serta budaya intelektual kerajaan-kerajaan klasik berikutnya.

Tujuan penulisan dari kajian ini adalah menelusuri bagaimana perkembangan politik dan kebudayaan Kerajaan Kutai dapat direkonstruksi melalui analisis terhadap Prasasti Yupa, serta menunjukkan peran Yupa sebagai bukti historis yang autentik mengenai struktur kekuasaan dan kebudayaan pada masa awal sejarah Indonesia. Selain itu, penulisan ini bertujuan menegaskan kontribusi Kutai terhadap pembentukan peradaban Nusantara, terutama pada periode transisi ketika masyarakat mulai mengenal sistem kerajaan, aksara, dan ritual legitimasi kekuasaan. Dengan pendekatan semacam ini,

perkembangan Kutai dapat dibaca bukan sekadar sebagai cerita lama, tetapi sebagai fondasi penting dari evolusi politik dan budaya Indonesia. Rumusan masalah dalam artikel ini berfokus pada bagaimana Prasasti Yupa dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami perkembangan politik dan kebudayaan Kerajaan Kutai. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana Yupa, sebagai sumber primer tertua yang menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, mampu memberikan gambaran mengenai struktur kekuasaan, praktik legitimasi raja, serta hubungan patronase antara penguasa dan kaum brahmana. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana unsur-unsur budaya, seperti ritual persembahan, keagamaan Hindu, dan penggunaan tradisi literasi India, tercermin dalam isi prasasti serta bagaimana data tersebut diinterpretasikan dalam kajian historiografi modern. Rumusan masalah ini sekaligus menyoroti relevansi kajian Kutai dalam memahami pembentukan kerajaan-kerajaan awal di Nusantara dan kontribusinya terhadap perkembangan politik serta kebudayaan Indonesia awal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertumpu sepenuhnya pada sumber-sumber tertulis yang memiliki legitimasi akademik kuat (Sabela Nina & Mahfud, 2025). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari jurnal sejarah, arkeologi, dan epigrafi yang mengulas perkembangan awal kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Karya-karya klasik, termasuk tulisan Georges Coedès mengenai formasi awal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara serta penelitian epigrafis L.C. Damais terkait karakter aksara, kronologi, dan persebaran prasasti kuno, menjadi fondasi penting dalam memahami konteks kemunculan Kerajaan Kutai. Selain itu, dokumen “Temuan Satu Abad Museum Nasional” turut memberikan sintesis temuan arkeologis yang telah dikurasi selama satu abad penelitian, selain itu digunakan juga artikel ilmiah yang sudah diterbitkan terkait kerajaan Kutai, sehingga memperkaya gambaran mengenai perkembangan budaya awal di Kalimantan Timur. Temuan-temuan kontemporer, baik dari artikel arkeologi maupun studi epigrafi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, dimanfaatkan untuk memperbarui interpretasi agar kesimpulan penelitian tidak terjebak pada pandangan lama yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengetahuan mutakhir (Assael et al., 2022).

Proses analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap seluruh literatur yang relevan, kemudian diikuti dengan penafsiran data menggunakan pendekatan tematik. Setiap temuan dibandingkan dan diuji secara kritis untuk menilai konsistensi argumen, keabsahan data, serta keterkaitannya dengan pokok bahasan penelitian. Melalui langkah-langkah ini, penelitian tidak hanya merangkum pemikiran para pakar, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik dan kebudayaan Kerajaan Kutai berdasarkan bukti tertulis yang ada. Pendekatan semacam ini pada akhirnya memberikan dasar yang lebih kuat bagi analisis historis yang akan dikembangkan pada bagian pembahasan selanjutnya.

Melalui proses evaluasi yang ketat tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada penyajian ulang pandangan para ahli, melainkan berupaya menafsirkan dinamika Kerajaan Kutai secara lebih komprehensif berdasarkan bukti tertulis yang tersedia, terutama Prasasti Yupa. Pendekatan seperti ini memungkinkan lahirnya analisis historis yang lebih terukur, mendalam, dan berlandaskan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi fondasi konseptual bagi pembahasan yang akan dikembangkan pada bagian selanjutnya. Untuk memperkuat pemahaman mengenai konteks awal terbentuknya kerajaan,

penelitian lanjutan dianjurkan memasukkan temuan arkeologi terbaru, terutama ekskavasi dan pemetaan situs di kawasan Muara Kaman yang masih berkembang. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas kajian terhadap teks-teks epigrafis lain di Nusantara agar posisi Yupa dalam perkembangan tradisi penulisan prasasti dapat dipahami lebih jelas tanpa mengubah fokus penelitian yang digunakan dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konteks Geografis dan Lingkungan Sungai Mahakam dalam Pembentukan Kerajaan Kutai

Kondisi geografis wilayah hulu–hilir Sungai Mahakam memainkan peranan penting dalam lahir dan berkembangnya Kerajaan Kutai pada abad ke-4 hingga 5 M. Sungai Mahakam yang mengalir dari Pegunungan Müller hingga bermuara di Selat Makassar bukan sekadar jalur air, tetapi berfungsi sebagai koridor ekologis yang menghubungkan berbagai komunitas pedalaman dengan dunia luar (Effendy, 2022; Kuri, 2018). Keberadaan sungai besar semacam ini merupakan faktor yang secara historis dikenal sebagai penentu awal tumbuhnya kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, karena menyediakan mobilitas, sumber daya, serta jaringan pertukaran yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan. Dalam konteks Kutai, posisi Muara Kaman yang menjadi lokasi ditemukannya Yupa, lokasi ini sangat strategis karena terletak pada titik transisi antara wilayah yang kaya sumber daya dan wilayah pesisir yang terhubung dengan rute perdagangan maritim internasional.

Lingkungan geografis di sekitar Mahakam juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang mendukung pembentukan otoritas politik. Daerah aluvial di sepanjang sungai memungkinkan aktivitas pertanian sederhana, seperti penanaman padi dan tanaman pangan lain, yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal (Irawan et al., 2021). Produk-produk tersebut merupakan barang dagangan yang banyak dicari pedagang Asia Selatan dan Asia Timur pada periode awal sejarah Nusantara. Ketersediaan sumber daya ini memperkuat posisi elite lokal untuk mengontrol distribusi dan akses terhadap komoditas, sekaligus menciptakan kondisi yang mendorong lahirnya struktur kekuasaan yang lebih terpusat. Kemampuan pemimpin lokal untuk mengelola sumber daya tersebut kemungkinan besar menjadi salah satu faktor yang mendukung munculnya tokoh seperti Kudungga sebelum proses indianisasi berkembang lebih jauh.

Selain itu, penelitian arkeologi dan geospasial terbaru menunjukkan bahwa dinamika aliran Mahakam mengalami perubahan sepanjang abad-abad awal Masehi, menciptakan berbagai dataran banjir, rawa, dan jalur sekunder yang memperluas ruang interaksi masyarakat (Kuras et al., 2012). Pola permukiman yang mengikuti alur sungai menunjukkan bahwa komunitas di sekitar Mahakam memiliki hubungan ekonomi dan sosial yang erat, sehingga memudahkan konsolidasi kekuasaan ketika struktur kerajaan mulai terbentuk. Jalur sungai juga memungkinkan mobilisasi tenaga kerja dalam skala yang lebih besar, sebuah prasyarat penting dalam pelaksanaan ritual dan pembuatan prasasti seperti Yupa. Kondisi ini memperkuat pemahaman bahwa Kutai tidak berdiri dalam ruang tertutup, tetapi lahir dari jaringan ekologis dan sosial yang telah berkembang secara bertahap.

Dari perspektif perdagangan, Sungai Mahakam memberikan akses langsung ke jalur maritim internasional menuju India dan dunia Asia Tenggara. Hubungan ini membuka peluang kontak budaya dan intelektual yang kemudian tercermin dalam penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam Yupa. Dengan kata lain, pengaruh India yang tampak dalam politik dan kebudayaan Kutai tidak terjadi dalam

isolasi, melainkan melalui interaksi dagang yang berlangsung secara konsisten. Kapal-kapal dari India Selatan, maupun jaringan perdagangan lain di Asia Tenggara diperkirakan singgah di kawasan pesisir Kalimantan Timur sebelum melanjutkan perjalanan ke jalur Laut Cina Selatan, sehingga memfasilitasi pertukaran ide dan praktik keagamaan yang mendukung perubahan sosial politik di Kutai.

Dengan melihat kembali kondisi geografis dan lingkungan Sungai Mahakam, dapat dipahami bahwa terbentuknya Kerajaan Kutai merupakan hasil dari kombinasi antara kekayaan sumber daya alam, letak strategis, dan keterhubungan dengan jaringan perdagangan internasional. Faktor-faktor ini menyediakan fondasi material dan sosial yang memungkinkan berkembangnya struktur kekuasaan terorganisasi yang kemudian diabadikan dalam prasasti-prasasti Yupa. Analisis geografis ini memperjelas bahwa evolusi politik dan budaya Kutai tidak dapat dilepaskan dari karakteristik lingkungan fisik yang mengelilinginya, yang berperan sebagai latar historis sekaligus pendorong utama transformasi peradaban pada masa awal sejarah Indonesia.

## 2. Posisi Prasasti Yupa sebagai Sumber Primer

Prasasti Yupa berfungsi sebagai sumber primer yang paling otoritatif dalam upaya merekonstruksi sejarah awal Kerajaan Kutai Martapura, sebuah kerajaan yang diperkirakan telah berdiri sejak sekitar abad ke-4 M. Ketiadaan catatan tertulis lain yang sezaman menjadikan Yupa satu-satunya bukti autentik yang mampu memberikan gambaran konkret mengenai dinamika politik, sosial, dan budaya pada masa itu. Informasi yang termuat di dalamnya tidak hanya mencatat silsilah raja, tetapi juga merefleksikan struktur ekonomi, praktik keagamaan, serta pola relasi sosial yang berkembang dalam masyarakat Kutai pada abad ke-4 hingga ke-5 M. Yupa juga tidak sekadar menjadi peninggalan material, melainkan dokumen historis yang memiliki nilai epistemologis tinggi karena menjadi landasan dasar dalam memahami fase-fase awal pembentukan kerajaan Hindu tertua di Nusantara tersebut.

## 3. Perkembangan Politik Kerajaan Kutai

Data epigrafis menunjukkan bahwa struktur kerajaan Kutai Martapura tersusun dalam silsilah yang berhasil dalam memimpin kerajaannya. Asal mula kerajaan ini dipimpin oleh kepala suku yang bernama Kudungga, diteruskan oleh Aswawarman yang disebut seperti dewa matahari, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman (Hudaidah et al., 2015, p. 36; Marzali, 2023). Dalam kajian historiografi Aswawarman disebut sebagai pendiri dinasti atau wangsakerta, sebab pada masa pimpinannya penggunaan gelar dan nama bergaya sanskerta yang menandai transisi dari kesukuan menuju Indianisasi (Rosati, 2017; Sri Hardiati, 1999, p. 16).

Peralihan penggunaan nama dari bentuk lokal seperti Kudungga menuju nama-nama yang bercorak Hindu misalnya Aswawarman dan Mulawarman menunjukkan bahwa proses indianisasi mulai mengakar kuat pada lingkungan elite Kutai (Supomo, 2000). Pergeseran ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi menandakan transformasi identitas politik yang lebih mendalam. Pengambilan nama bergaya Sanskerta dapat dibaca sebagai upaya sadar untuk menautkan diri dengan tradisi kerajaan India yang telah mapan, sehingga memberikan legitimasi yang lebih tinggi terhadap posisi para penguasa Kutai. Fase ini menandai langkah penting dalam evolusi politik Kutai pada abad ke-4 hingga ke-5 M, ketika pengaruh India mulai terintegrasi dengan konteks lokal dan menghasilkan bentuk pemerintahan yang lebih terorganisasi.

Data dari prasasti-prasasti Yupa menunjukkan bahwa salah satu mekanisme utama legitimasi

kekuasaan di Kerajaan Kutai terwujud melalui penyelenggaraan ritual kurban besar yang dipersembahkan oleh Raja Mulawarman kepada para brahmana (Kuri, 2018). Penyebutan kurban emas, sapi, dan hadiah-hadiah bernilai tinggi dalam teks Yupa bukan hanya menggambarkan kemurahan hati raja, tetapi juga memperlihatkan fungsi ritual tersebut sebagai instrumen politik yang memperkuat posisi Mulawarman dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks masyarakat awal yang telah tersentuh budaya India, hubungan antara raja dan brahmana memiliki dimensi religius sekaligus politis, raja menampilkan dirinya sebagai pelindung agama dan patron utama kaum pendeta, sementara para brahmana memberikan legitimasi sakral yang mempertegas kewenangan raja sebagai penguasa yang diakui secara kosmologis.

Pola patronase yang tercermin dalam Yupa memperlihatkan bahwa relasi timbal balik antara penguasa dan komunitas brahmana tidak berhenti pada dimensi ritual keagamaan semata, melainkan berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam pembentukan otoritas politik. Melalui pemberian persembahan dalam skala besar, Mulawarman menunjukkan kapasitas ekonomi dan kemampuan redistributif yang menjadi salah satu indikator penting kepemimpinan pada masa itu (Marzali, 2023). Di sisi lain, para brahmana yang menerima persembahan tersebut memberikan legitimasi spiritual yang menguatkan posisi raja dalam tatanan sosial dan keagamaan. Dengan adanya ritual kurban yang dipahatkan dalam Yupa memainkan peran sentral sebagai instrumen formal untuk mengukuhkan, memperluas pengaruh, serta menjaga stabilitas kekuasaan kerajaan pada fase awal perkembangan politik Kutai.

Penemuan tujuh Yupa di wilayah Kutai memberikan gambaran yang kuat bahwa kerajaan ini telah mencapai tingkat organisasi politik dan sosial yang cukup maju pada masa awal perkembangannya (Poesponegoro & Notosusanto, 2019 : 35). Banyaknya prasasti yang dibuat menunjukkan bahwa praktik penulisan tidak terjadi secara sporadis, melainkan merupakan bagian dari mekanisme administratif yang telah tersusun rapi. Proses produksi Yupa sendiri menuntut keberadaan tenaga ahli dalam seni pahat, kemampuan teknis untuk menuliskan aksara Pallawa dengan presisi, akses terhadap bahan berkualitas, serta dukungan pembiayaan yang hanya dapat dipenuhi oleh pemerintahan dengan sumber daya yang stabil (Wirawan et al., 2025). Lebih jauh lagi, keberadaan sejumlah prasasti tersebut mencerminkan bahwa Kutai memiliki struktur pemerintahan yang mampu mengatur ritual-ritual publik secara konsisten, melibatkan komunitas brahmana, dan merumuskan pesan politik serta keagamaan dalam media yang bersifat monumental. Dengan kata lain, Yupa-Yupa ini tidak hanya berfungsi sebagai rekam jejak sejarah, tetapi juga menjadi bukti operasional bahwa pemerintahan Kutai telah memiliki kapasitas administratif dan ekonomi yang mapan pada abad awal sejarahnya.

Dalam kata lain, rangkaian Yupa ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga bukti material bahwa Kerajaan Kutai telah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang stabil, menunjukkan adanya mekanisme manajemen sumber daya yang efektif untuk kepentingan legitimasi politik, pelaksanaan ritual keagamaan, serta pemeliharaan tradisi istana pada abad ke-4 hingga ke-5 M.

#### **4. Perkembangan Kebudayaan Kerajaan Kutai**

Keterangan dalam Yupa yang menyebut pemberian persembahan kepada kaum brahmana memberikan petunjuk kuat mengenai orientasi keagamaan masyarakat Kutai pada masa awal. Kehadiran brahmana sebagai tokoh penerima kurban menunjukkan bahwa struktur keagamaan yang berkembang di wilayah ini telah dipengaruhi oleh tradisi Hindu, khususnya unsur-unsur yang berkaitan dengan praktik vedis. Berdasarkan model religi yang umum pada awal proses indianisasi, besar kemungkinan bahwa ritual yang dilakukan Mulawarman berkaitan dengan pemujaan terhadap dewa-dewa utama Hindu, termasuk

Siwa, atau setidaknya mengikuti pola liturgi yang berakar pada kitab-kitab Weda (Revire, 2016). Pengaruh tersebut tidak berhenti pada aspek ritual semata, tetapi juga mencerminkan peran agama sebagai instrumen sosial dan politik yang mengatur hubungan antara raja, brahmana, dan masyarakat (Stark, 2020). Para brahmana berperan menjaga otoritas keagamaan sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan melalui penerimaan dan pemberkatan ritual. Dengan demikian, praktik keagamaan yang terekam dalam Yupa menggambarkan bagaimana agama menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas budaya dan tatanan sosial Kerajaan Kutai, serta turut membentuk struktur otoritas politik pada masa itu.

Penggunaan bahasa Sanskerta dalam tujuh Yupa Kutai menunjukkan bahwa lingkungan istana pada masa itu telah berinteraksi dengan tradisi intelektual India yang berpengaruh kuat di Asia Selatan. Bahasa ini, yang lazim dipakai dalam konteks keagamaan, sastra, dan politik, disusun dalam bentuk metrum yang relatif teratur, menandakan keterlibatan individu yang memiliki kemampuan linguistik tinggi kemungkinan besar para brahmana yang memahami kaidah filologis dan gaya sastra Sanskerta klasik. Sementara itu, pemakaian aksara Pallawa, yang merupakan salah satu bentuk tulisan India Selatan dari periode abad ke-4 hingga 5 M, menempatkan prasasti-prasasti Kutai dalam arus perkembangan epigrafi regional (Samsir, 2019). Karakter paleografinya yang konsisten dengan kronologi tersebut memperlihatkan bahwa budaya tulis telah memperoleh posisi penting di kalangan elite politik. Penulisan Yupa bukan hanya kegiatan pencatatan, melainkan bagian dari praktik institusional untuk menegaskan legitimasi raja, mengabadikan penyelenggaraan ritual, dan memperkuat citra kerajaan melalui bahasa serta aksara yang memiliki nilai simbolis tinggi.

Keterangan dalam Yupa mengenai pemberian minyak kental, malai bunga, serta sejumlah besar sapi menunjukkan bahwa ritual keagamaan dalam tradisi Kutai berperan sebagai wahana untuk menampilkan prestise dan kekuatan ekonomi raja (Poesponegoro & Notosusanto, 2019 : 39). Persembahan semacam ini bukan tindakan seremonial biasa, melainkan indikator bahwa penguasa memiliki akses luas terhadap sumber daya yang hanya mungkin dikelola oleh struktur politik yang kuat. Minyak wangi dan rangkaian bunga memiliki nilai simbolik dalam praktik keagamaan Hindu awal, sedangkan sapi merupakan bentuk persembahan yang lazim diasosiasikan dengan kemakmuran serta kemurahan hati raja. Besarnya skala persembahan yang dicatat pada Yupa memperlihatkan upaya Mulawarman untuk memproyeksikan citra kepemimpinan yang makmur, terhormat, dan dihormati oleh kelompok religius.

Ritual bersifat publik ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Kutai telah mengenal pola hubungan sosial yang tersusun secara hierarkis. Raja berada pada posisi paling atas sebagai penyedia persembahan dan pemilik otoritas, para brahmana menempati posisi penting sebagai pihak yang memimpin atau menerima ritual, sedangkan lapisan masyarakat umum menjadi bagian dari komunitas yang mendukung proses penyelenggaraan upacara tersebut. Kehadiran unsur-unsur ritual yang kompleks dan melibatkan beragam kelompok ini mengindikasikan adanya sistem sosial yang teratur, tempat legitimasi politik dan keagamaan saling berkaitan melalui praktik-praktik seremonial yang dicatatkan dalam Yupa. Integrasi budaya pada masa awal Kerajaan Kutai tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses penyerapan unsur-unsur India secara langsung, melainkan sebagai hasil pertemuan dua tradisi yang kemudian membentuk identitas politik dan kebudayaan baru. Bukti paling jelas berasal dari nama Kudungga yang tidak menunjukkan ciri linguistik India, melainkan mencerminkan asal-usul lokal yang kuat. Hal ini menandakan bahwa kelompok elite pribumi memegang peran sentral dalam pembentukan struktur awal kerajaan, sebelum pengaruh India semakin menguat melalui generasi berikutnya seperti Aswawarman dan Mulawarman.

Tradisi keagamaan dan politik yang berkembang di Kutai menunjukkan bahwa unsur asing yang masuk tidak diterima secara mentah, tetapi diolah dan disesuaikan dengan konteks sosial setempat. Penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa pada Yupa, misalnya, menunjukkan keterhubungan Kutai dengan dunia intelektual India, tetapi substansi ritual, struktur kekuasaan, serta pola hubungan sosial tetap dipengaruhi oleh tradisi lokal yang telah berkembang sebelumnya (Damais, 1995 : 7). Proses ini mencerminkan karakteristik umum kerajaan-kerajaan awal Nusantara, di mana pengaruh luar diadaptasi secara selektif untuk memperkuat otoritas politik, memperluas jaringan budaya, dan membangun identitas kerajaan yang berbeda dari pusat-pusat peradaban India. Integrasi unsur lokal dan asing tersebut menjadikan Kutai sebagai contoh awal terbentuknya budaya politik yang khas di wilayah Indonesia bagian timur pada masa awal pembentukan negara-negara kuno (Permata et al., 2025).

Implikasi historis dari keberadaan Kerajaan Kutai sangat penting bagi perkembangan peradaban Nusantara pada masa-masa berikutnya. Kutai, yang sering dianggap sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, menyediakan kerangka awal bagi munculnya pusat-pusat politik lain seperti Tarumanagara, Sriwijaya, hingga Mataram Kuno. Pola-pola dasar yang tampak pada Kutai, baik dalam struktur pemerintahan, praktik ritual, maupun hubungan antara raja dan kelompok religius yang menjadi fondasi bagi tradisi politik yang berkembang di berbagai wilayah kepulauan Indonesia pada abad-abad selanjutnya. Penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam prasasti Yupa juga memperlihatkan munculnya budaya literasi yang kemudian berkembang di berbagai kerajaan Hindu-Buddha lain. Pengalaman Kutai dalam membangun otoritas melalui patronase kepada brahmana, penyelenggaraan ritual publik, dan penerapan unsur-unsur kebudayaan India secara selektif mencerminkan pola umum kerajaan-kerajaan awal Nusantara yang menggabungkan elemen lokal dengan pengaruh luar untuk memperkuat legitimasi dan identitas politiknya. Tradisi tersebut menjadi salah satu ciri khas perkembangan peradaban di kawasan ini selama berabad-abad.

## KESIMPULAN

Kajian terhadap tujuh Prasasti Yupa serta sumber-sumber literatur sejarah, arkeologi, dan epigrafi menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai Martapura merupakan salah satu pusat awal pembentukan tradisi politik dan kebudayaan Hindu di Nusantara. Data epigrafis memperlihatkan bahwa proses munculnya kerajaan tidak berlangsung melalui adopsi penuh budaya India, melainkan melalui sintesis antara unsur lokal dan pengaruh luar. Keberadaan nama Kudungga yang berakar pada tradisi pribumi memperkuat gambaran bahwa struktur kepemimpinan awal Kutai lahir dari komunitas lokal, sebelum proses indianisasi berkembang pada masa Aswawarman dan Mulawarman yang mulai memakai nama serta simbol politik bergaya Sanskerta.

Analisis terhadap Yupa juga memperlihatkan kapasitas administrasi yang relatif maju untuk ukuran abad ke-4 hingga 5 M. Jumlah prasasti yang cukup banyak mengindikasikan keberulangan ritual, ketersediaan sumber daya, keterlibatan tenaga ahli, serta keberadaan struktur birokrasi yang mampu menyelenggarakan upacara publik secara teratur. Hal ini menandakan bahwa Kutai telah memiliki tata kelola pemerintahan yang terorganisasi dan stabil, sekaligus menunjukkan adanya hubungan erat antara produksi teks epigrafis dengan proyek penguatan legitimasi kekuasaan.

Aspek bahasa dan aksara dalam Yupa memperlihatkan perkembangan tradisi literasi di kalangan elite Kutai. Penggunaan Sanskerta dalam metrum yang baik serta pemakaian aksara Pallawa menunjukkan

keterlibatan kelompok terdidik, kemungkinan besar brahmana yang berperan menyusun narasi legitimasi penguasa melalui medium teks. Elemen ini tidak hanya menunjukkan kontak budaya dengan India, tetapi juga menegaskan fungsi bahasa dan aksara sebagai perangkat ideologis dalam konstruk kekuasaan.

Ritual persembahan Mulawarman yang terekam dalam Yupa memperlihatkan peran agama sebagai mekanisme legitimasi politik. Hubungan patronase antara raja dan brahmana menggambarkan pola umum kerajaan awal Asia Tenggara, di mana kekuasaan sakral dibangun melalui pertukaran simbolik antara pemimpin politik dan pemuka agama. Struktur masyarakat Kutai juga tercermin melalui pengaturan ritual tersebut, yang mengonfirmasi adanya stratifikasi sosial yang terdiri atas raja, brahmana, dan masyarakat umum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Kerajaan Kutai bukan hanya kerajaan tertua secara kronologis, tetapi juga fondasi awal bagi perkembangan politik, budaya, dan tradisi literasi di Nusantara. Pengalaman Kutai dalam mengelola legitimasi, membangun birokrasi, serta mengintegrasikan unsur lokal dan asing memberikan kerangka awal bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar berikutnya seperti Tarumanagara, Sriwijaya, dan Mataram Kuno. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa Kutai memiliki peranan historis yang signifikan dalam pembentukan peradaban awal Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assael, Y., Sommerschild, T., Shillingford, B., Bordbar, M., Pavlopoulos, J., Chatzipanagiotou, M., Androutopoulos, I., Prag, J., & de Freitas, N. (2022). Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. *Nature*, 603(7900), 280–283. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04448-z>
- Damais, L. C. (1995). Epigrafi dan sejarah Nusantara: Pilihan karangan Louis-Charles Damais. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/13604>
- Darme, M., & Andhifani, W. R. (2023). Masuk dan berkembang agama Hindu dalam pengaruhnya terhadap sistem kepercayaan masyarakat Nusantara. *Danadyaksa Historica*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.32502/jdh.v3i1.6045>
- Effendy, M. A. R. (2022). River transportation network and the development of civilization on the east coast of Kalimantan at the end of colonial era. In *Proceedings of the 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture in the Nature of Malay) (ASBAM 2021) (Vol. 660, pp. 149–154)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.020>
- George, C. (1975). *The Indianized states of Southeast Asia* (W. F. Vella, Ed.; English ed.). Australian National University Press.
- Hudaidah, Widiadi, A. N., Susanti, L. R., & Ernalida. (2015). *Buku ajar sejarah Asia Tenggara*. Universitas Sriwijaya.
- Irawan, B., Akbar, P., Purnomo, E. P., & Nurmandi, A. (2021). Development planning to accelerate Sustainable Development Goals (SDGs) in Mahakam Ulu Districts as a new autonomous region. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(2), 184–195. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.184-195>
- Kuras, J., Central, C., & Fallon, B. (2012). npj Heritage Science—The onward journey. *Heritage Science*. <https://doi.org/10.1038/s40494-025-01640-y>
- Kuri. (2018). Basir in religious system of Dayak Hindu Kaharingan society. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 2(2), 164–174. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n2.159>

- Marzali, A. (2023). Sejarah awal kerajaan Melayu di Jambi. *Jurnal Pengajian Melayu*, 34(2), 65–80. <https://doi.org/10.22452/jomas.vol34no2.5>
- Permata, A. N., Yunani, A., Pinem, M., Burhanudin, D., & Isman. (2025). Reconstructing the role of local actors in the Islamization of East Kalimantan. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 15(1), 1–26. <https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.1-25>
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah nasional Indonesia* (Vol. 2). Balai Pustaka.
- Revire, N. (2016). Dvāravatī and Zhenla in the seventh to eighth centuries: A transregional ritual complex. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(3), 393–417. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000254>
- Rosati, P. E. (2017). The cross-cultural kingship in early medieval Kāmarūpa: Blood, desire and magic. *Religions*, 8(10), Article 212. <https://doi.org/10.3390/rel8100212>
- Sabela Nina, B., & Mahfud, M. (2025). Kebijakan pemerintah terhadap gerakan perempuan Indonesia pada masa Orde Baru. *Jurnal Sangkala*, 4(2), 61–70. <https://doi.org/10.62734/js.v4i2.505>
- Samsir, S. (2019). Masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 3(2), 30–39. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1318>
- Sarip, M. (2020). Kajian etimologis Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur. *Yupa: Historical Studies Journal*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.30872/yupa.v4i2.264>
- Sopian, H., & Norhidayat. (2022). Silsilah dan perkembangan Kerajaan Kutai Kartanegara (1300–1732). *Amarthapura Historical Studies Journal*, 1(2), 62–70.
- Sri Hardiati, E. (1999). *Temuan satu abad*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Stark, M. T. (2020). Landscapes, linkages, and luminescence: First-millennium CE environmental and social change in mainland Southeast Asia. In *Primary sources and Asian pasts* (pp. 233–260). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110674088-008>
- Supomo, S. (2000). Chapter 15: Indic transformation: The Sanskritization of Jawa and the Javanization of the Bharata (pp. 309–332). University of Hawai'i Press.
- Wirawan, I. G. B., Suda, I. K., Adnyana, I. G., Sukadana, I. W., Winyana, I. N., & Yudabakti, I. M. (2025). The role of Yupa inscription as Yantra in Shiva worship: Interpreting stone relics through contemporary practices in Kutai Kartanegara. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1), Article 2521981. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2521981>